

MEWUJUDKAN DESA TANPA KEMISKINAN DAN KELAPARAN DENGAN DANA DESA (2019-2020) DI JAWA TENGAH

*Artika Taryani*¹, *Nadia Nur Rahma*², *Nur Sukma Alam*³, *Rizma Yunita Eka Putri*⁴, *Rr. Raina Avissa Dione Belindasari*⁵, *Suparjito*^{6*}

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Kemenkeu RI

E-mail: suparjito@kemenkeu.go.id

ABSTRAK

Studi ini berfokus pada peran penggunaan dana desa untuk mewujudkan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs Desa setidaknya berfokus pada tiga hal yaitu, kemiskinan, ketahanan pangan, dan stunting. Dengan terbitnya Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tujuan penyaluran dana desa menjadi semakin jelas. Metode analisis yang digunakan dalam karya tulis ini adalah analisis statistik korelasi pearson untuk mengukur korelasi antara jumlah dana desa dengan tingkat kemiskinan, tingkat ketahanan pangan, dan jumlah stunting. Hasil perhitungan Korelasi Pearson menunjukkan bahwa korelasi antara dana desa dan kemiskinan memiliki hubungan positif cukup kuat di tahun 2019 dan positif lemah di tahun 2020. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh korelasi antara dana desa dan stunting yang menghasilkan hubungan positif lemah di kedua tahun penelitian tersebut. Di sisi lain, korelasi pearson menunjukkan bahwa hubungan antara dana desa dan Indeks Ketahanan Pangan memiliki hubungan negatif cukup kuat selama tahun 2019 & 2020.

Kata Kunci—Dana Desa, Korelasi Pearson, Kemiskinan, Stunting, Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

ABSTRACT

This study focuses on the role of using village funds to realize the Sustainable Development Goals (SDGs) program. The Village SDGs focus on at least three things, namely, poverty, food sustainability, and stunting. With the release of Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, the purpose of distributing village fund has become clearer. The Analytical method used in this paper is statistical analysis using Pearson correlation to measure the correlation between the amount of village fund and the poverty index, the food sustainability index, and the number of stunting. Pearson correlation shows that the correlation between village funds and poverty has a fairly strong positive relationship in 2019 and a weak positive relationship in 2020. The same is also shown by the correlation between village fund and stunting which results in a weak positive relationship in both years. on the other hand, Pearson correlation shows that the correlation between village fund and the food sustainability index has a fairly strong negative relationship during 2019 & 2020.

Keywords—Village Funds, Pearson Correlation, Poverty, Stunting, The Food Sustainability Index

1. PENDAHULUAN

Dana desa merupakan bagian tak terpisahkan dari APBN semenjak kebijakan tersebut diluncurkan pada tahun 2015. Merujuk data jumlah desa yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan^[1], diketahui bahwa sebesar 91 persen wilayah Indonesia adalah wilayah desa. Fakta tersebut semakin menguatkan pentingnya peranan dana desa untuk mendorong peningkatan ekonomi desa dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran dana desa yang diterima tiap desa dipengaruhi oleh status pembangunan desa yang terdiri dari desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, maupun desa mandiri. Ketentuan penggunaan dana desa disesuaikan dengan potensi dan tipologi desa terkait.

Pada tahun 2019, dasar pengalokasian Dana Desa diatur dalam PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa^[2]. Sementara itu, pada tahun 2020 dasar pengalokasian Dana Desa diatur dalam PMK 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa^[3]. Kedua aturan tersebut menjelaskan bahwa

rincian dana desa setiap kabupaten dialokasikan secara merata dan berkeadilan menurut alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula. Antara tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat perbedaan porsi dari empat pagu yang menjadi dasar pengalokasian dana desa. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1 Perbedaan porsi pagu dasar alokasi dana desa

No	Jenis Pagu Alokasi	2019	2020
1	Alokasi Dasar	69%	65%
2	Alokasi Afirmasi	1,50%	1%
3	Alokasi Kinerja	1,50%	3%
4	Alokasi Formula	28%	31%
	a. Jumlah penduduk	a. 10%	a. 10%
	b. Angka kemiskinan desa	b. 50%	b. 40%
	c. Luas wilayah desa	c. 15%	c. 20%
	d. Tingkat kesulitan geografis	d. 25%	d. 30%

Sumber; Kementerian Keuangan diolah

Munculnya program *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa sejak terbitnya Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan^[4] semakin memperjelas tujuan disalurkan dana desa. Pada prinsipnya, program SDGs Desa memastikan semua aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (*no one left behind*) SDGs Desa merupakan penyederhanaan dari SDGs Nasional yang tercantum dalam Perpres 59/2017. Seluruh tujuan dalam SDGs Nasional diadopsi dan disesuaikan dengan pencapaian level desa. Adanya SDGs Desa diharapkan akan membentuk kondisi desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa peduli kesehatan, desa peduli pendidikan, desa peduli lingkungan, desa ramah perempuan, desa ekonomi tumbuh merata, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya.

Dari beberapa tujuan SDGs Desa tersebut, pencapaian target desa tanpa kelaparan dan kemiskinan merupakan salah satu prioritas penting yang harus diperhatikan. Kemiskinan dan kelaparan merupakan masalah umum yang dihadapi di seluruh dunia. Dilansir dari laman sdgsdesa.kemendes.go.id^[5] ^[6] salah satu agenda utama SDGs Desa adalah mengurangi kemiskinan dan membentuk ketahanan pangan pada tahun 2030. Berdasarkan paparan dari Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar,^[7] terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana target desa tanpa kemiskinan dan kelaparan tercapai yaitu tingkat kemiskinan, prevalensi *stunting*, dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Dalam rangka mencapai desa tanpa kemiskinan dan kelaparan tentu diperlukan campur tangan dari pemerintah. Bentuk intervensi pemerintah diwujudkan dalam kebijakan penyaluran dana desa.

2. METODE PENELITIAN

✓ Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif menggunakan uji korelasi Pearson. Uji korelasi Pearson ini digunakan penulis untuk menjelaskan keterkaitan penggunaan dana desa terhadap tingkat kemiskinan, prevalensi *stunting*, dan IKP (Indeks Ketahanan Pangan). Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Penulis mendapatkan data dari OMSPAN, Berita Resmi Statistik, buku, dan literatur-literatur terkait. Variabel

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain dana desa, tingkat kemiskinan, prevalensi *stunting*, dan IKP.

Metode statistik korelasi Pearson adalah metode untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dana desa, tingkat kemiskinan, IKP, dan prevalensi *stunting*. Rumus koefisien korelasi Pearson sebagai berikut (Gaspersz, 1992).

$$r = \frac{n \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \sum_{i=1}^n X_i \sum_{i=1}^n Y_i}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\sum_{i=1}^n X_i)^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n Y_i^2 - (\sum_{i=1}^n Y_i)^2}}$$

Keterangan:

r = koefisien korelasi

X = variabel dependen (variabel bebas)

Y = variabel independen (variabel terikat)

n = jumlah data

Nilai koefisien korelasi berkisar antara 1 dan -1 ($-1 \leq r \leq 1$), di mana koefisien korelasi positif berarti bahwa hubungan antar variabel adalah searah, sementara koefisien korelasi negatif berarti hubungan antar variabel adalah berbanding terbalik atau berlawanan arah. Untuk mengetahui kekuatan hubungan variabel-variabel tersebut, digunakan pedoman berikut (Sekaran, 2010).

Nilai koefisien 0	: Tidak ada hubungan sama sekali (jarang terjadi)
Nilai koefisien 1	: Hubungan sempurna (jarang terjadi)
Nilai koefisien > 0 s.d. < 0,2	: Hubungan sangat lemah
Nilai koefisien 0,2 s.d. < 0,4	: Hubungan lemah
Nilai koefisien 0,4 s.d. < 0,6	: Hubungan cukup kuat
Nilai koefisien 0,6 s.d. < 0,8	: Hubungan kuat
Nilai koefisien 0,8 s.d. < 1	: Hubungan sangat kuat

Dana Desa

Menurut [PMK Nomor 190/PMK.07/2021](#) tentang Pengelolaan Dana Desa, disebutkan bahwa Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan kepada Desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ditransfer dari APBN melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rencana pembangunan global yang disetujui oleh 193 kepala negara pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs mengusung tema *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan akan tercapai pada tahun 2030. Tiga dari 17 tujuan SDGs tersebut adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun; mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan; dan memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.

Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluaran (atau pendapatannya) berada di bawah garis kemiskinan. Terdapat tiga pendekatan untuk mendefinisikan garis kemiskinan, yaitu *the cost of basic needs approach*, *the food energy intake method*, dan *subjective evaluations*. *The cost of basic needs approach* memperkirakan biaya untuk memperoleh makanan bernutrisi cukup, ditambah dengan kebutuhan pokok lainnya seperti pakaian dan tempat tinggal. *The food energy intake method* memplot pengeluaran (atau pendapatan) per kapita terhadap konsumsi makanan untuk menentukan tingkat pengeluaran di mana kebutuhan makanan tercukupi. Metode ini biasanya digunakan apabila informasi harga tidak tersedia. Sementara itu, *subjective evaluations* didasarkan pada hasil wawancara kepada masyarakat tentang berapa tingkat pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan (Haughton & Khandker, 2009)

Pendekatan yang paling sering digunakan adalah *the cost of basic needs approach*, pendekatan ini juga merupakan pendekatan yang dijadikan acuan oleh BPS dalam mengukur kemiskinan, dimana Garis Kemiskinan (GK) merupakan hasil penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makan (GKNM).

Ketahanan Pangan

Mengacu pada [Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012](#), ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dimana kebutuhan pangan negara sampai dengan perseorangan dapat terpenuhi. Hal tersebut ditandai dengan tersedianya pangan yang cukup, baik secara jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut kemudian digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan disebut Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Penyusunan IKP mengadopsi pengukuran indeks global *Global Food Security Index – (GFSI)* dengan berbagai penyesuaian metodologi sesuai dengan ketersediaan data dan informasi di tingkat wilayah kabupaten/kota dan provinsi. IKP ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*), karena indikator yang digunakan dalam IKP merupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional.

Badan Ketahanan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian menggunakan sembilan indikator dalam menentukan IKP, antara lain 1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih; 2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; 3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran; 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik; 5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; 6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih; 7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk; 8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*); dan 9. Angka harapan hidup pada saat lahir.

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP (Tabel 2.1). *Cut off point* IKP merupakan hasil penjumlahan dari masing –

masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100). Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Tabel 2.1 Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75 – 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96 – 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2019 & 2020, Diolah.

Stunting

Stunting atau kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki tinggi badan rendah (pendek) dibandingkan dengan usianya (Kementerian Kesehatan, 2018). *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kondisi *stunting* yaitu apabila tinggi badan lebih dari dua standar deviasi di bawah median WHO *child growth standards*. Stunting dapat disebabkan oleh kekurangan gizi kronis atau penyakit berulang yang biasanya terkait dengan kemiskinan, kesehatan gizi ibu yang buruk saat hamil, serta pemberian ASI dan perawatan yang tidak tepat pada usia dini (World Health Organization, 2014).

Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2007), analisis deskriptif merupakan analisis statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa

Menurut data dana desa dari OMSPAN, diketahui bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 alokasi dana desa di Provinsi Jawa Tengah masing-masing sebesar Rp7,89 triliun dan Rp8,12 triliun. Di sisi lain, realisasi penyerapan dana desa di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp7,66 triliun dan Rp8,35 triliun. Kabupaten dengan realisasi penyerapan dana desa terbesar pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah Brebes. Kabupaten dengan realisasi penyerapan dana desa terkecil pada tahun 2019 adalah Kudus, sedangkan pada tahun 2020 adalah Sukoharjo.

Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2019 rata-rata kemiskinan di Jawa Tengah berada pada angka 11,24%. Untuk kabupaten yang memiliki angka kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Kebumen sebesar

16,82%. Sedangkan kabupaten yang memiliki angka kemiskinan terendah yaitu Kab. Jepara sebesar 6,6%. Korelasi antara dana desa dengan tingkat kemiskinan dapat dilihat dalam besarnya hasil uji korelasi sebagai berikut.

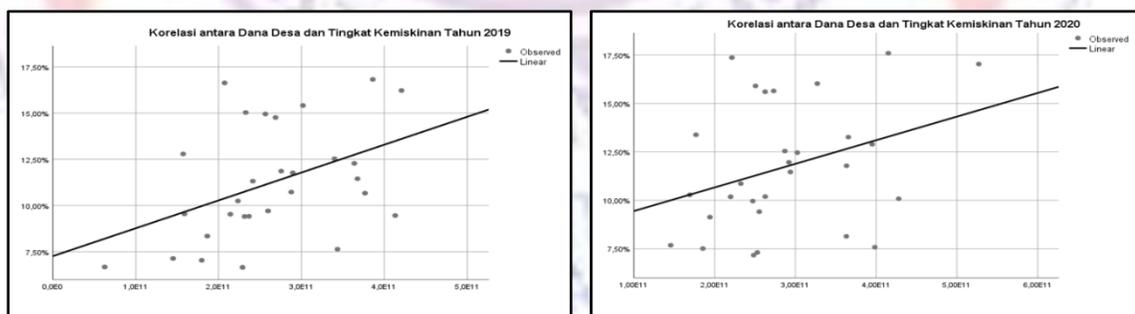
Tabel 3 Hasil uji korelasi pearson dana desa dengan angka kemiskinan

Correlations				Correlations			
		DanaDesa 2019	Kemiskinan2019			DanaDesa 2020	Kemiskinan2020
DanaDesa 2019	Pearson Correlation	1	,426 ^{**}	DanaDesa 2020	Pearson Correlation	1	0,333
	Sig. (2-tailed)		0,021		Sig. (2-tailed)		0,078
	N	29	29		N	29	29
Kemiskina n2019	Pearson Correlation	,426 ^{**}	1	Kemiskina n2020	Pearson Correlation	0,333	1
	Sig. (2-tailed)	0,021			Sig. (2-tailed)	0,078	
	N	29	29		N	29	29

Sumber; BPS diolah

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, dapat diketahui bahwa Dana Desa 2019 dan Tingkat Kemiskinan 2019 memiliki tingkat signifikansi yang ditunjukkan oleh Sig. F Change <0,05. Dari hasil tersebut juga diketahui Dana Desa 2019 dan Tingkat Kemiskinan 2019 memiliki hubungan yang cukup kuat yakni sebesar positif 0.426. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa 2019 dan Tingkat Kemiskinan 2019 memiliki hubungan searah di mana apabila suatu daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi maka alokasi Dana Desa pada daerah tersebut juga tinggi. Sedangkan untuk hasil perhitungan SPSS terhadap Dana Desa 2020 dan Tingkat Kemiskinan 2020, dapat diketahui bahwa hubungan keduanya tidak signifikan yang ditunjukkan oleh Sig. F Change > 0.05. Dari hasil tersebut juga diketahui Dana Desa 2020 dan Tingkat Kemiskinan 2020 memiliki hubungan yang lemah yakni sebesar 0,333. Sebagai pendukung informasi hasil perhitungan *pearson correlation* antara Dana Desa dan Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah, disediakan juga gambar *scatterplot* sebagai berikut:

Grafik 1 Scatterplot Dana Desa dengan TingkatKemiskinan



Sumber: SPSS diolah

Penyebab kemiskinan menurut Sharp, et al (dalam Kuncoro,1997:131) jika dipandang dari sisi ekonomi yaitu, pertama secara mikro, kemiskinan muncul sebagai akibat dari ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kedua, kemiskinan terjadi karena perbedaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang rendah akan membuat produktivitas rendah sehingga upah yang diterima rendah. Ketiga, kemiskinan muncul disebabkan oleh adanya perbedaan akses dalam modal. ^[20] Melihat tingkat kemiskinan pada tahun 2019 di

Jawa Tengah yang masih tinggi dengan rata-rata 11,24% menandakan masih banyak daerah di Jawa Tengah yang mengalami ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah mendesain pengalokasian Dana Desa dengan suatu formula yang dapat mengurangi masalah ketimpangan ekonomi tersebut.

Dasar pengalokasian Dana Desa diatur dalam PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Di dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa rincian dana desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula. Pagu Alokasi dasar dihitung sebesar 69% dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa secara nasional. Pagu Alokasi Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1,5% dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 1,5% dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 28% dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. Untuk angka kemiskinan sendiri memiliki porsi 50% dari pagu alokasi formula.

Dari empat basis pengalokasian Dana Desa tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan suatu daerah diperhitungkan dalam mengalokasikan Dana Desa. Untuk daerah yang memiliki penduduk miskin yang tinggi akan mendapat porsi yang lebih tinggi pada perhitungan pagu afirmasi dan pagu formula. Suatu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dengan mendapat alokasi Dana Desa yang tinggi dimaksudkan untuk mengatasi salah satu penyebab kemiskinan yaitu adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 telah membuat perekonomian negara ini turun serta berdampak juga pada rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pun naik menjadi 11,74%. Akibat pandemi Covid-19, beberapa belanja pemerintah difokuskan untuk menanggulangi pandemi covid 19. Sistematisa Dana Desa di tahun 2020 mengalami perubahan dengan dicabutnya PMK yang lama dengan PMK No. 222/PMK.07/2020. Perubahan tersebut antara lain, Pagu Alokasi Dasar menjadi 65%, Pagu Alokasi Afirmasi menjadi 1%, Pagu Alokasi Kinerja menjadi 3%, dan Pagu Alokasi Formula menjadi 31% dengan porsi dari angka kemiskinan sebesar 40%. Dari perubahan tersebut dapat dilihat porsi angka kemiskinan terhadap perhitungan alokasi Dana Desa menjadi lebih kecil dibanding tahun 2019. Atau dengan kata lain tingkat kemiskinan tidak lagi berpengaruh signifikan terhadap jumlah dana desa yang akan disalurkan untuk suatu daerah. Selain itu, pandemi Covid-19 telah membuat postur APBN 2020 berubah dengan ditandai keluarnya Perpres No 72 Tahun 2020^[21]. Pemerintah mengambil kebijakan dalam mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan melalui penguatan bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, subsidi tepat sasaran, dan dana desa. Anggaran perlindungan sosial di tahun 2020 mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan dalam bentuk Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), PBI JKN, Kartu Indonesia Pintar, Subsidi, dan Dana Desa, serta Program Pembiayaan KUR dan UMi.

Dengan demikian penyebab Dana Desa tidak memiliki korelasi dengan tingkat kemiskinan di tahun 2020 adalah karena program pengentasan kemiskinan tidak hanya berpangku pada Dana Desa saja tetapi di tahun 2020 terdapat lebih banyak program sosial pemerintah seperti yang sudah disebutkan di atas dalam rangka menanggulangi kemiskinan.

Ketahanan Pangan

Alokasi dana desa untuk program ketahanan pangan sebenarnya bukan hal yang baru. Kebijakan terkait pangan telah ada dari masa orde lama hingga pemerintahan saat ini. Prioritas penggunaan dana desa dalam rangka pengembangan ketahanan pangan adalah untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan dan juga stabilitas harga pangan. Hingga pada tahun 2012 akhirnya dirilis Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Mengacu pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil Indeks Ketahanan Pangan pada wilayah kabupaten dan kota baik di tahun 2019 maupun 2020 yang dirilis oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa secara umum IKP untuk wilayah Indonesia bagian barat lebih baik apabila dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian timur. Merujuk pada data IKP Tahun 2019, kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki nilai IKP terbaik adalah Kabupaten Sukoharjo (87,89) dan Kabupaten Wonogiri (86,55) yang masing – masing menempati urutan ke-4 dan ke-5 dalam peringkat nasional IKP Tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, Kabupaten Sukoharjo (88,76) masih menempati urutan ke-4 dalam peringkat nasional IKP yang diikuti dengan Kabupaten Pati (88,25) pada urutan ke-5. Secara umum, Jawa Tengah menempati urutan ke-4 dengan skor IKP sebesar 78,85 pada tahun 2019 dan meningkat menjadi urutan ke-2 pada tahun 2020 dengan skor IKP sebesar 82,31 dalam peringkat nasional. Korelasi antara Dana Desa 2019 dengan Indeks Ketahanan Pangan 2019 dapat dilihat dalam besarnya hasil uji korelasi sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil uji korelasi pearson dana desa dengan IKP

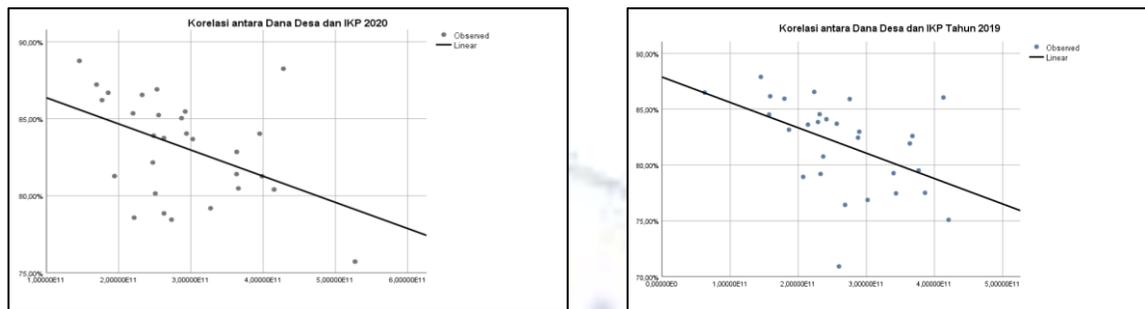
		DanaDesa2019	IKP2019			DanaDesa2020	IKP2020
DanaDesa2019	Pearson Correlation	1	-.483**	DanaDesa2020	Pearson Correlation	1	-.455*
	Sig. (2-tailed)		0,008		Sig. (2-tailed)		0,013
	N	29	29		N	29	29
IKP2019	Pearson Correlation	-.483**	1	IKP2020	Pearson Correlation	-.455*	1
	Sig. (2-tailed)	0,008			Sig. (2-tailed)	0,013	
	N	29	29		N	29	29

Sumber: Kementerian Pertanian, Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, dapat diketahui bahwa Dana Desa 2019 dan IKP 2019 memiliki tingkat signifikansi yang ditunjukkan oleh Sig. F Change < 0.05. Dari hasil tersebut juga diketahui Dana Desa 2019 dan IKP 2019 memiliki hubungan yang cukup kuat yakni sebesar negatif 0.483. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa 2019 dan IKP 2019 memiliki hubungan yang berbanding terbalik, di mana apabila dana desa naik maka IKP akan turun.

Sedangkan untuk hasil perhitungan SPSS terhadap Dana Desa 2020 dan IKP 2020, dapat diketahui bahwa keduanya memiliki tingkat signifikansi yang ditunjukkan oleh Sig.F Change < 0.05. Dari hasil tersebut juga diketahui Dana Desa 2020 dan IKP 2020 memiliki hubungan yang cukup kuat yakni

sebesar negatif 0.455. Hal ini berarti Dana Desa 2020 dan IKP 2020 memiliki hubungan yang berbanding terbalik, di mana apabila dana desa naik maka IKP akan turun. Sebagai pendukung informasi hasil perhitungan *pearson correlation* antara Dana Desa dan IKP di tahun 2019 dan 2020 di Jawa Tengah, disediakan sebaran data dalam bentuk *scatterplot* sebagai berikut.



Grafik 2 Scatterplot dana desa dengan IKP

Sumber; SPSS diolah

Hasil perhitungan tersebut bernilai negatif karena dimungkinkan adanya Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin menurun dan menimbulkan *multiplier effect* sehingga berdampak juga pada ketahanan pangan yang ikut menurun. Menurut *World Food Summit* (1996) yang dikutip dari buku yang berjudul *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security* yang dikeluarkan oleh FAO (2008), ketahanan pangan diukur berdasarkan ketersediaan pangan secara fisik, aksesibilitas dalam mendapatkan pangan, dan stabilitas harga pangan^[23]. Sehingga, dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terganggunya rantai pasok pangan akibat aktivitas yang dibatasi selama pandemi memberikan dampak terhadap aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.

Kajian dari Hafni R., Sinulingga N.S., & Hasibuan L.S. (2021) tentang analisis evaluasi dampak BLT dana desa di era pandemi dapat dijadikan dasar dalam mengetahui alasan dana desa berkorelasi negatif terhadap indeks ketahanan pangan. Sesuai dengan kajian tersebut, dapat diketahui bahwa pembatasan aktivitas selama Pandemi Covid-19 membuat beberapa masyarakat harus kehilangan pekerjaan karena menjadi korban PHK sehingga menurunkan pendapatan rumah tangga. Penurunan pendapatan menyebabkan masyarakat hanya memfokuskan pendapatan yang mereka terima untuk memenuhi konsumsi makanan pokok^[24]. Hal ini menyebabkan pengeluaran total untuk konsumsi makanan pokok masyarakat lebih tinggi dibanding konsumsi lain sehingga mempengaruhi salah satu indikator IKP yaitu **“persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran”**. Mengingat dampak Pandemi Covid-19 menghambat berbagai lini kehidupan tak terkecuali masyarakat desa, peranan dana desa menjadi krusial karena menjadi jaring pengaman. Dana desa dapat membantu masyarakat untuk tetap bertahan di masa pandemi meskipun bantuan tersebut belum mencukupi kebutuhan secara keseluruhan. *Stunting*

Program penanganan stunting melalui Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi mulai digalakkan oleh pemerintah pada tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019, pemerintah mengalokasikan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk mendukung program tersebut. Adapun dana TKDD yang digunakan untuk mendukung kelancaran program penanganan stunting terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik serta Dana

Desa^[25]. Fakta tersebut dapat dijadikan landasan untuk melakukan penelitian mengenai keterkaitan penggunaan dana TKDD, khususnya Dana Desa, terhadap penanganan stunting di Provinsi Jawa Tengah.

Menurut data profil kesehatan yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, persentase prevalensi stunting pada tahun 2019 berada di angka 7,4%. Kabupaten dengan persentase tertinggi adalah Banjarnegara, sedangkan kabupaten dengan persentase terendah adalah Kendal. Kabupaten Purworejo dan Grobogan tidak tersedia data^[26]. Pada tahun 2020, persentase prevalensi stunting mencapai angka 13,7%. Kabupaten dengan persentase tertinggi adalah Wonosobo, sedangkan kabupaten dengan persentase terendah adalah Kudus^[27]. Keterkaitan antara realisasi penyerapan dana desa dengan persentase prevalensi stunting di Jawa Tengah pada tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat dari hasil uji korelasi Pearson menggunakan SPSS berikut.

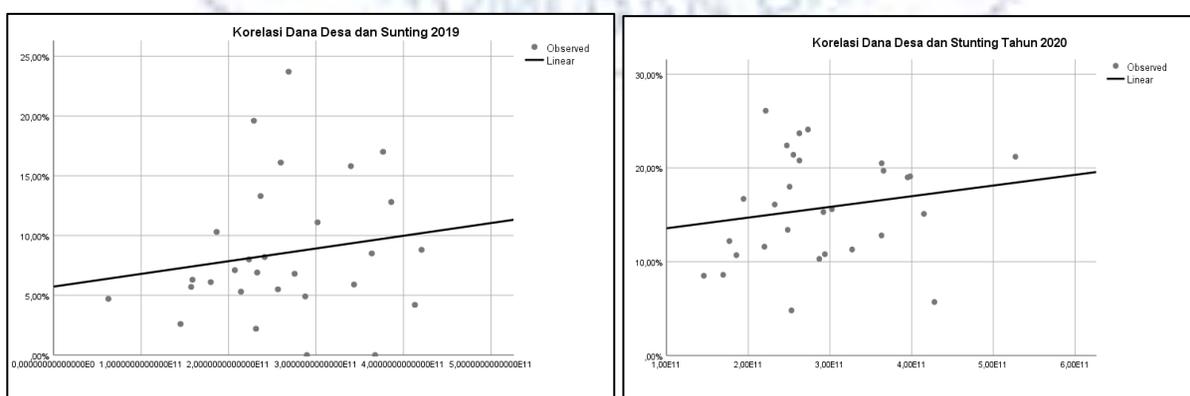
Tabel 5 Hasil uji korelasi pearson dana desa dengan prevalensi stunting

2019				2020			
Correlations				Correlations			
		DanaDesa 2019	Stunting 2019			DanaDesa 2020	Stunting 2020
DanaDesa 2019	Pearson Correlation	1	0,163	DanaDesa 2020	Pearson Correlation	1	0,179
	Sig. (2-tailed)		0,399		Sig. (2-tailed)		0,354
	N	29	29		N	29	29
Stunting 2019	Pearson Correlation	0,163	1	Stunting 2020	Pearson Correlation	0,179	1
	Sig. (2-tailed)	0,399			Sig. (2-tailed)	0,354	
	N	29	29		N	29	29

Sumber; Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah diolah

Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2019 diperoleh tingkat signifikansi $0,399 > 0,05$. Masih sama dengan hasil uji korelasi Pearson tahun sebelumnya, pada tahun 2020 diperoleh tingkat signifikansi $0,354 > 0,05$. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa koefisien korelasi pada tahun 2019 dan tahun 2020 masing-masing 0,163 dan 0,179 yang menunjukkan korelasi positif sangat lemah. Artinya, dapat dikatakan tidak ada korelasi antara realisasi penyerapan dana desa dengan persentase prevalensi stunting. Untuk memperjelas hasil uji korelasi Pearson antara realisasi penyerapan dana desa dengan persentase prevalensi stunting pada tahun 2019 dan tahun 2020, berikut sebaran data kedua variabel dalam bentuk *scatterplot*.

Grafik 2 Scatterplot dana desa dengan prevalensi stunting



Sumber; SPSS diolah

Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi penyerapan dana desa di Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki keterkaitan signifikan dengan persentase prevalensi stunting. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Indra & Khoirunurrofik (2022) yang mengkaji dampak dana desa terhadap prevalensi stunting di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan metode *descriptive data analysis* dan *fixed effect panel regression*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa secara signifikan dapat mengurangi prevalensi stunting di Indonesia, kecuali wilayah di pulau Jawa, akibat variasi alokasi dana desa dan jumlah penduduk. Dana desa akan mempengaruhi prevalensi stunting di wilayah yang memperoleh alokasi dana desa per kapita lebih besar dan memiliki kapasitas kompetensi perangkat desa yang lebih baik. Alasan utama dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap prevalensi stunting di pulau Jawa adalah dana desa per kapita di pulau Jawa jauh lebih kecil dibandingkan dana desa per kapita di luar Jawa karena pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia^[28]. Kajian lain dari Anggraeni, Margawati, & Nurjazuli (2021) tentang intervensi penanganan stunting yang dilakukan dengan metode *literature review* juga bisa dijadikan dasar untuk mengetahui alasan dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap prevalensi stunting. Dari hasil kajian diketahui bahwa anggaran dana desa sudah dialokasikan untuk penanganan stunting. Namun, alokasinya belum maksimal sehingga masih perlu disosialisasikan terkait prioritas penggunaan dana desa untuk stunting^[29].

Hasil kesimpulan tersebut dapat dibuktikan dengan data Laporan Stunting yang tersedia di OMSPAN. Pada tahun 2019, diketahui sebanyak Rp59,07 miliar dana desa di Provinsi Jawa Tengah dialokasikan untuk kebutuhan penanganan stunting. Besaran tersebut hanya 0,77% dari total realisasi penyerapan dana desa. Dari 29 kabupaten yang menerima dana desa, 10 diantaranya melaporkan penggunaan dana desa untuk kegiatan penanganan stunting. Adapun kabupaten yang melaporkan adalah Grobogan, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Klaten, Pekalongan, Purbalingga, Demak, Cilacap, dan Kebumen. Wonosobo menjadi kabupaten yang memberikan alokasi tertinggi untuk penanganan stunting yaitu 12,34% dari total realisasi penyerapan dana desa Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan alokasi tersebut, Wonosobo dapat menekan persentase prevalensi stunting di angka 7,1% atau lebih rendah 0,3% dari rata-rata persentase prevalensi stunting Jawa Tengah.

Sementara itu pada tahun 2020, alokasi dana desa di Provinsi Jawa Tengah untuk kebutuhan penanganan stunting sebesar Rp182,44 miliar atau 2,18% dari total realisasi penyerapan dana desa. Dari 29 kabupaten yang menerima dana desa, 14 diantaranya melaporkan penggunaan dana desa untuk kegiatan penanganan stunting. Adapun kabupaten yang melaporkan adalah Grobogan, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Klaten, Pekalongan, Purbalingga, Demak, Cilacap, Kebumen, Pati, Jepara, Banyumas, dan Magelang. Demak menjadi kabupaten yang memberikan alokasi tertinggi untuk penanganan stunting yaitu 16,26% dari total realisasi penyerapan dana desa Kabupaten Demak. Berdasarkan alokasi tersebut, Demak dapat menekan persentase prevalensi stunting di angka 10,3% atau lebih rendah 3,4% dari rata-rata persentase prevalensi stunting Jawa Tengah.

4. PENUTUP

KESIMPULAN

Sejak munculnya program SDGs Desa melalui terbitnya Perpres 59/2017, dana desa turut dialokasikan untuk mencapai tujuan dalam program tersebut. Salah satu tujuan dalam program SDGs Desa adalah Desa tanpa Kemiskinan dan Desa tanpa Kelaparan. Uji korelasi Pearson dilakukan supaya

dapat mengetahui keterkaitan dana desa dengan pencapaian tujuan program SDGs Desa di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 dan tahun 2020. Variabel yang digunakan untuk uji korelasi pearson adalah dana desa, tingkat kemiskinan, prevalensi stunting, dan IKP. Hasil dari uji korelasi Pearson dalam variabel tersebut antara lain:

- Hasil pengujian menunjukkan korelasi positif cukup kuat dan signifikan antara realisasi penyerapan Dana Desa dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2019 yang menandakan bahwa suatu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi akan memiliki realisasi penyerapan Dana Desa yang tinggi juga. Hal itu terjadi karena tingkat kemiskinan suatu daerah menjadi dasar perhitungan pada alokasi Dana Desa tepatnya pada alokasi pagu afirmasi dan pagu formula.
- Hasil uji korelasi Pearson antara realisasi penyerapan Dana Desa dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 menunjukkan korelasi positif lemah dan tidak signifikan atau dengan kata lain tidak ada korelasi antara tingkat kemiskinan dan dana desa. Hasil tersebut dikarenakan pada tahun 2020 program pengentasan kemiskinan tidak hanya berpangku pada Dana Desa saja, selain itu terdapat perubahan kebijakan yang mengakibatkan porsi tingkat kemiskinan yang menjadi basis perhitungan alokasi dana desa pada perhitungan pagu afirmasi dan pagu formula menjadi lebih kecil dibandingkan tahun 2019.
- Hasil pengujian antara realisasi penyerapan dana desa terhadap ketahanan pangan pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan korelasi negatif cukup kuat yang artinya bahwa semakin tinggi penyerapan dana desa maka semakin rendah IKP. Hasil korelasi negatif cukup kuat tersebut dapat terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang memberikan *multiplier effect* terhadap rumah tangga sehingga beberapa masyarakat harus kehilangan pekerjaan karena menjadi korban PHK dan membuat pendapatan masyarakat berkurang yang mengakibatkan penurunan konsumsi makanan pokok.
- Hasil uji Korelasi Pearson antara realisasi penyerapan dana desa dengan persentase prevalensi stunting pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan tidak ada korelasi yang signifikan. Hal ini dapat terjadi karena dana desa per kapita di Provinsi Jawa Tengah besarnya cukup kecil akibat jumlah penduduk yang padat. Faktor lain adalah alokasi anggaran dana desa belum maksimal untuk penanganan stunting. Pernyataan tersebut didukung dengan data laporan stunting di OMSPAN pada tahun 2019 dan tahun 2020. Dari sebanyak 29 kabupaten, hanya 10 kabupaten (2019) dan 14 kabupaten (2020) saja yang melaporkan kegiatan penanganan stunting menggunakan dana desa.

SARAN

Dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan data dengan periode waktu yang lebih panjang serta cakupan wilayah yang lebih luas, sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih bersifat umum atas penggunaan Dana Desa dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, stunting Dan ketahanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.*
- [2] Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.*

- [3] Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- [4] Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.
- [5] Kementerian Desa. (2020). *SDGs Desa Nomor 1: Desa Tanpa Kemiskinan*. Dipetik 2022, dari SDGs Desa: <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/sdgs-des-a-no-1-des-a-tanpa-kemiskinan/>
- [6] Kementerian Desa. (2020). *SDGs Desa Nomor 2: Desa Tanpa Kelaparan*. Dipetik 2022, dari SDGs Desa: <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/sdgs-des-a-nomor-2-des-a-tanpa-kelaparan/>
- [7] Iskandar, A. H. (2020). *Arjuna SDGs Desa*. Dipetik 2022, dari Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa: <https://www.arjuna16sp.com/wp-content/uploads/2021/01/Metodologi-dan-Pengukuran-SDGs-Desa.pdf>.
- [8] Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Dana Desa*.
- [9] Bappenas. *Beranda: SDGs Dashboard Indonesia*. Dipetik 2022, dari SDGs Dashboard Indonesia: <https://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/>.
- [10] International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Dipetik 2022, dari Sustainable Development Goals: <https://www.sdg2030indonesia.org/>
- [11] Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington, DC: The World Bank.
- [12] Republik Indonesia. (2012). *Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.
- [13] Badan Ketahanan Pangan. (2019). *Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2019*. Jakarta: Kementerian Pertanian..
- [14] Badan Ketahanan Pangan. (2020). *Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- [15] Kementerian Kesehatan. (2018). *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi.
- [16] World Health Organization. (2014). *Publications: World Health Organization*. Dipetik 2022, dari Global Nutrition Targets 2025: Stunting Policy Brief: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.3>.
- [17] Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- [18] Gaspersz, V. (1992). *Teknik Analisis Dalam Penelitian Percobaan*. Bandung: Tarsito Bandung
- [19] Sekaran, U. (2010). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Karya Salemba Empat.
- [20] Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Daerah - Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- [21] Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*.
- [22] Kementerian Keuangan. (2020). *Pokok - Pokok APBN 2020: Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta.

- [23] FAO. (2008). *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security*. FAO Food Security Programme.
- [24] Hafni, R., Sinulingga, N. S., & Hasibuan, L. S. (2021). Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Ketahanan Pangan di Era Pandemi (Studi Kasus Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara). *Seminar Nasional Kewirausahaan*.
- [25] Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi*.
- [26] Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. (2019). *Buku Profil Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2019*. Jawa Tengah.
- [27] Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Buku Profil Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2020*. Jawa Tengah.
- [28] Indra, J., & Khoirunurrofik. (2022). Understanding the Role of Village Fund and Administrative Capacity in Stunting Reduction: Empirical Evidence from Indonesia. *PLoS ONE*.
- [29] Anggraeni, R. D., Margawati, A., & Nurjazuli. (2021). Evaluasi Penanganan Stunting Melalui Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 dengan Metode Sistematis Review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*.